

Policy Note

REKOMENDASI ISU EKONOMI PRIORITAS DALAM KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN 2023

July 2022

Ringkasan

Di tengah perkembangan ekonomi, politik, dan keamanan kawasan dan global yang dinamis, peran Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun depan akan menjadi faktor penentu kesiapan ASEAN dalam merealisasikan visi ASEAN 2025—yang mengedepankan keamanan dan stabilitas, integrasi pasar, dan inklusivitas. Krisis 3C yaitu *Conflict*, *Climate Change*, dan COVID-19 masih akan menjadi risiko besar dalam perekonomian dunia, sehingga ASEAN dituntut untuk menjadi relevan, responsif, dan meninggalkan pendekatan “*business as usual*” untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Oleh sebab itu, beberapa isu menjadi penting dan mendesak untuk dibahas dalam ASEAN Chairmanship tahun 2023, antara lain terkait isu keamanan pangan, transisi energi, dan ekonomi digital.

Pertama, isu keamanan pangan yang mengancam akibat dari konflik Rusia-Ukraina. Penting bagi negara ASEAN untuk mendukung keterbukaan rantai pasok yang dapat menjamin keberlangsungan pasar internasional pangan di kawasan dan memberikan kepastian lebih tinggi. Oleh sebab itu, isu ini dapat difokuskan untuk mengharmonisasikan definisi ketahanan pangan di kawasan, serta mengaktifkan inisiatif penyediaan cadangan pangan untuk situasi darurat. Optimalisasi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan, serta efisiensi transportasi dan logistik di kawasan juga diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi negara ASEAN.

Selanjutnya, agenda transisi energi di ASEAN perlu dipercepat. Kuncinya adalah untuk mendapatkan keseimbangan antara ketahanan energi (*energy security*) jangka pendek dan transisi energi yang berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi dan ketahanan iklim (*climate security*) ASEAN di masa depan. Salah satunya, melalui implementasi teknologi batu bara bersih, dan penguatan industri mobil listrik dan investasi energi terbarukan. ASEAN juga dapat mengoptimalkan *green and blended financing* sebagai opsi pembiayaan berkelanjutan dalam sektor energi.

Terakhir, isu ekonomi digital di ASEAN seperti pembenahan tata kelola data dan *cross-border data flow* perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan integrasi ekonomi digital. Hal ini penting untuk memaksimalkan keuntungan dari tren digitalisasi yang diproyeksikan akan tumbuh secara signifikan dan diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS pada tahun 2030. Selain itu, perbaikan literasi dan keterampilan digital untuk kelompok rentan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan peningkatan kemudahan mobilitas tenaga kerja di sektor ekonomi digital untuk mewujudkan ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing.

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama dua setengah tahun terakhir telah mengubah kondisi perekonomian dunia secara signifikan. Ketidakpastian dan kerentanan masih membayangi prospek pemulihan ekonomi, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Ini juga diperparah oleh meningkatnya ketegangan geopolitik global yang diakibatkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Berbagai permasalahan tersebut masih akan mendominasi perekonomian kawasan di tahun 2023 ketika Indonesia memegang posisi sebagai Chair dari ASEAN.

- Perang yang terjadi di Ukraina semakin memperparah gangguan perdagangan antar negara dan disrupti pada rantai pasok dunia (*global supply chain*). Harga-harga bahan makanan dan energi telah mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Untuk mengamankan pasokan dalam negeri, beberapa negara penghasil bahan pangan dan energi mulai melakukan batasan ekspor atau kebijakan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ini mendorong terjadinya kondisi *prisoner dilemma* yang semakin mengancam keamanan pangan (*food security*) dan keamanan energi (*energy security*) di banyak negara, termasuk di kawasan ASEAN.
- Pengetatan kebijakan moneter yang agresif, sebagai bagian dari *exit-strategy* yang dilakukan oleh bank sentral Amerika Serikat, The Fed, juga telah meningkatkan risiko stabilitas pasar keuangan global. Kebijakan The Fed yang menghentikan kebijakan *quantitative easing* dan secara agresif menaikkan suku bunga telah memicu peningkatan volatilitas pasar keuangan global, mendorong arus keluar modal yang cepat, dan mengakibatkan depresiasi mata uang yang tajam di banyak negara ASEAN. Gangguan pasar keuangan global ini, bersamaan dengan naiknya harga-harga komoditas global telah meningkatkan tekanan inflasi domestik negara-negara ASEAN.
- Isu makroekonomi lainnya adalah permasalahan beban utang dan kemampuan pembayaran, terutama dari banyak negara berkembang yang terancam tidak lagi mampu membayar beban utang mereka. Meskipun negara ASEAN berada dalam situasi yang relatif lebih aman, ini akan meningkatkan biaya modal dan utang yang masih akan diperlukan dalam menghadapi berbagai agenda pembangunan pasca-pandemi.
- Sementara itu, isu kesehatan masih merupakan ancaman. Varian yang lebih mematikan dan lebih mudah menyebar kemungkinan masih dapat muncul lagi. Dan pemulihan kesehatan masih terkendala dengan belum meratanya ketersediaan vaksin di beberapa negara ASEAN. Di saat bersamaan, merebaknya wabah COVID-19 dari varian *omicron* yang terjadi di China diperkirakan juga

dapat mengganggu rantai pasok dunia dan menghambat pemulihan ekonomi di banyak negara di dunia, termasuk para anggota ASEAN.

- Pada jangka menengah-panjang, dampak kerusakan atau jaringan parut (*scarring effect*) yang ditinggalkan oleh pandemi COVID-19 ini juga telah menimbulkan eksekusi negatif yang besar, seperti hilangnya kesempatan belajar akibat penutupan sekolah atau tingginya tingkat pengangguran permanen/jangka panjang, melemahnya keterikatan pasar tenaga kerja di masa datang, serta perubahan strategi dunia usaha dalam perilaku investasi mereka. Hal ini selanjutnya dapat semakin memperparah tingkat penciptaan lapangan kerja, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi di banyak negara ASEAN.
- Selanjutnya, terdapat juga isu dan tantangan yang terkait dengan perkembangan informasi dan teknologi digital yang amat pesat. Di bidang teknologi digital, kawasan ini masih dihadapkan pada masalah kesenjangan digital (*digital divide*) yang besar antarnegara, antarwilayah dalam satu negara, ataupun antara penduduk. Ini diakibatkan tidak meratanya ketersediaan dan akses infrastruktur telekomunikasi, maupun keterampilan (*skills*) dan literasi. Kebebasan lalu lintas data antar negara (*cross-border data flow*) dan masalah *data security* dan *privacy* akibat peraturan dan kebijakan yang tidak sama di setiap negara juga ditengarai telah menghambat proses transformasi ekonomi digital dan partisipasi masyarakat dalam perkembangan ekonomi digital.
- Tentunya tidak bisa dilupakan permasalahan terkait dengan kualitas lingkungan dan perubahan iklim. Beberapa isu utama terkait strategi transisi energi, termasuk pembiayaannya, serta upaya penciptaan ekonomi hijau, perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari negara ASEAN. Bukan hanya untuk turut berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memberikan respons tepat terhadap dampak dari perubahan iklim (*climate adaptation*), serta kebijakan iklim di tingkat global.

Berdasarkan berbagai isu dan tantangan atas, Kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023 (*Indonesia ASEAN Chairmanship 2023*) harus mampu menjawab dan menyiapkan solusi-solusi yang konkret untuk berbagai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, arahan prioritas ekonomi yang nantinya akan ditawarkan pada masa Kepemimpinan Indonesia di ASEAN harus dapat mencakup berbagai isu dan tantangan di atas, baik itu yang bersifat jangka pendek ataupun jangka menengah-panjang.

Beberapa hal mendasar juga dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan prioritas dalam bidang ekonomi:

- Berbagai prioritas tersebut dapat mengambil keuntungan dari posisi ASEAN bersama berbagai mitra dialog, dengan tetap menekankan *ASEAN Centrality*. Ini

bukan hanya dapat memperluas jangkauan dari program kerja sama yang diperlukan, tetapi juga dapat menambah dukungan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai usulan kerja sama tersebut. Untuk itu, Indonesia dapat memulai melakukan komunikasi untuk berbagai agenda penting yang juga menjadi minat dari berbagai negara mitra dialog di ASEAN.

- Beberapa agenda yang Indonesia majukan di dalam G20, dapat juga menjadi agenda untuk ASEAN, mengingat bahwa banyak isu global yang dapat dijalankan pada tingkat regional. Ini juga akan meningkatkan prospek keberhasilan dan keberlanjutan berbagai agenda tersebut.
- Harus juga diperhatikan bahwa ASEAN kurang mempunyai mekanisme implementasi. Untuk itu, berbagai agenda yang ada perlu dapat diterjemahkan ke tingkatan rencana aksi, dengan berbagai kewajiban dan peran dari masing-masing negara, termasuk kemungkinan pembentukan platform untuk *resource pooling*, beserta partisipasi dari mitra dialog ASEAN.

Isu Prioritas 1: Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kawasan ASEAN

Ketahanan pangan merupakan agenda lama ASEAN yang kian lama kian mendesak. Pandemi COVID-19 dan krisis global Rusia-Ukraina menunjukkan kerentanan dalam bidang pangan terkait tidak hanya pada aspek produksi dan produktivitas sektor pertanian, tetapi juga keterbukaan rantai pasok atau distribusi pangan, serta kemampuan respons dalam keadaan darurat.

Untuk mengatasi permasalahan darurat ketahanan pangan, ASEAN dapat mengaktifkan cadangan pangan yang dapat digunakan untuk membantu negara anggota yang mengalami krisis. Negara ASEAN juga perlu mendukung keterbukaan rantai pasok yang dapat menjamin keberlangsungan pasar internasional pangan di kawasan dan memberikan kepastian lebih tinggi. Dari sisi produksi, diperlukan kerja sama yang lebih intensif dan ditujukan untuk membangun pertanian yang lebih *sustainable*. Isu ketahanan pangan ini menjadi sangat penting mengingat meningkatnya dampak perubahan iklim dan perlunya adaptasi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Tiga hal ini merupakan masalah yang sudah menjadi perhatian sejak ketahanan pangan menjadi agenda permanen ASEAN pada 2009. ASEAN *Integrated Food Security (AIFS) Framework* 2009-2013 muncul karena krisis harga pangan 2008-2009. Garis besar AIFS periode 2015-2020, dan periode 2021-2025 kurang lebih juga tetap sama. Mengingat

semakin mendesaknya permasalahan yang ada, berbagai aspirasi yang dijabarkan dalam *framework* tersebut perlu dijabarkan sebagai kebijakan dan rencana aksi.

Beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai agenda penguatan ketahanan pangan di ASEAN dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, harmonisasi definisi ketahanan pangan di kawasan. Drimie dan Ruysenaar (2010) menyebutkan bahwa pemahaman yang kurang baik terkait ketahanan pangan dan pengukurannya merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemui oleh suatu negara dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Evolusi definisi yang diformulasi oleh Organisasi Ketahanan Pangan dan Pertanian (FAO) sejak 1974 melahirkan pilar-pilar yang bukan hanya fokus pada ketersediaan (*availability*) dan penggunaan (*utilization*), akan tetapi juga pada konteks akses (*accessibility*) dan stabilitas (*stability*).

Dari empat pilar ketahanan pangan tersebut, perlu dipahami oleh negara-negara di kawasan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan tidak dapat bergantung hanya pada kapasitas produksi atau ketersediaan pangan saja, akan tetapi juga perlu membuka akses seluas-luasnya agar perdagangan produk pertanian dan pangan di kawasan dapat lebih terbuka tanpa ada restriksi yang berlebihan. Negara-negara di ASEAN perlu memahami ini agar tidak terjadi kebijakan populis dalam bentuk nasionalisme sempit yang berujung pada kebijakan pelarangan ekspor pangan yang justru cenderung membahayakan perwujudan ketahanan pangan di kawasan.

Kedua, lebih mengaktifkan inisiatif penyediaan cadangan pangan untuk situasi darurat. Pada tahun 1979, ASEAN sepakat untuk mempunyai *ASEAN Food Security Reserve* sebagai mekanisme cadangan untuk ketahanan pangan dalam masa krisis. Ini diwujudkan dalam bentuk cadangan untuk beras, yang terutama dijalankan pada tingkatan *ASEAN Plus Three Rice Reserve* (APTERR). Skema ini dapat ditingkatkan secara lebih jauh dengan memperluasnya dalam tiga bidang. Pertama, dalam hal peningkatan stok cadangan, serta mekanisme pengeluaran cadangan. Kedua, memperluas cakupan terhadap berbagai bahan pangan lainnya di luar beras. Ketiga, dengan memperluas informasi yang dipantau oleh sekretariat APTERR, dengan juga memperhatikan berbagai indikator pangan penting untuk tiap negara dan di tingkatan kawasan.

Ketiga, optimalisasi sumber daya di kawasan untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi negara-negara di ASEAN memang memiliki variasi yang cukup beragam. Meskipun begitu, masing-masing negara di ASEAN memiliki keunikan sumber daya, baik yang bersifat fisik (*capital*) maupun non-fisik (sumber daya manusia (SDM)). Infrastruktur pertanian, logistik, dan transportasi, kapasitas SDM, dan teknologi yang dimiliki setiap negara di ASEAN perlu dioptimalkan. Optimalisasi sumber daya ini dapat

didorong dengan kerja sama yang intensif di kawasan agar terjadi proses pembelajaran (*lesson learned*) dan yang paling penting adalah adanya transfer teknologi, pengetahuan, dan keahlian (*knowledge and skills*) dari negara ASEAN yang dapat dikategorikan sebagai "*champion*" (*best practice*) kepada negara ASEAN yang dinilai masih memerlukan pengembangan sumber daya yang dimiliki.

Keempat, efisiensi transportasi dan logistik di kawasan. Dalam konteks ketahanan pangan, negara-negara di kawasan yang memiliki keterbatasan lahan pertanian sangat bergantung pada impor produk pertanian/pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dalam praktiknya, memang banyak tantangan dalam realisasi keterbukaan perdagangan produk pertanian/pangan. Beberapa hambatan tarif dan non-tarif, termasuk agenda politik masing-masing negara yang cukup beragam dan cenderung protektif, serta pemahaman yang kurang baik terkait definisi ketahanan pangan, sering kali menjadi batu sandungan bagi negara-negara di kawasan untuk mewujudkan transportasi dan logistik yang lebih efisien, terutama untuk produk-produk pertanian/pangan. Chandra dan Lontoh (2010) menyoroti pentingnya solidaritas atau kepentingan kawasan di atas kepentingan dalam negeri. Sementara itu, Intal (2015) pernah menyampaikan tiga aspek untuk mewujudkan ketahanan pangan di kawasan dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di antaranya implementasi *electronic custom/National Single Window* (NSW), perbaikan sistem transportasi dan logistik, serta akselerasi infrastruktur pendukung.

Isu Prioritas 2: Keamanan Energi dan Transisi Energi di ASEAN

Energi akan menjadi agenda jangka pendek dan jangka panjang yang penting untuk kawasan ASEAN. Pada jangka panjang, ASEAN perlu berusaha mengurangi emisinya dan memenuhi komitmen masing-masing negara ASEAN dalam perjanjian Paris Agreement, di samping memenuhi kebutuhan yang meningkat. PDB ASEAN diproyeksikan akan bertumbuh tiga kali lipat pada 2040 bahkan setelah mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19, dan karena itu kebutuhan energi pun diproyeksikan akan bertumbuh 3.6% per tahun. Kesadaran ASEAN akan kerentanan ekonomi dan lingkungan ASEAN terhadap dampak perubahan iklim terlihat dalam laporan *6th ASEAN Energy Outlook* dan perjanjian *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation* (APAEC) yang mendorong transisi sistem energi ASEAN menjadi sistem yang lebih hijau, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan.

Namun, pada jangka pendek kepentingan energi ASEAN dipengaruhi bayang-bayang perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan, salah satunya kelangkaan pasokan energi untuk pasar global, termasuk di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN perlu mempertimbangkan bagaimana menyeimbangkan agenda ketahanan energi (*energy*

security) jangka pendek dan transisi energi yang berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi dan ketahanan iklim (*climate security*) ASEAN di masa depan.

Pertama, ASEAN dapat mendorong **implementasi teknologi batu bara bersih (*clean coal technologies*)** guna memenuhi kebutuhan energi jangka pendek. Tidak bisa dipungkiri bahwa batu bara masih merupakan pilihan sumber energi yang termurah untuk Asia Tenggara, dan penggunaannya akan berkontribusi besar untuk menekan peningkatan harga energi yang sedang di alami masyarakat. Namun, batu bara juga merupakan sumber energi yang paling berpolusi.

Jika ASEAN ingin tetap mencapai kontribusinya terhadap perjanjian Paris Agreement sambil memenuhi kebutuhan energi jangka pendek, ASEAN perlu mendorong implementasi teknologi batu bara bersih di PLTU batu bara yang ada seperti penggunaan batu bara rendah sulfur, teknologi desulfurisasi, sistem *co-firing*, dan penggunaan teknologi *carbon capture, utilization, and storage* (CCUS) untuk menyimpan dan mendaur ulang hasil emisi batu bara. Penggunaan teknologi batu bara bersih merupakan agenda yang bersifat *low-hanging fruit*, mudah dicapai, dan berdampak untuk masyarakat serta upaya iklim ASEAN.

Kedua, ASEAN perlu menggerakkan **penghijauan sektor transportasi dengan mobil listrik**. Pembangunan industri mobil elektrik merupakan gerakan tepat untuk mengurangi emisi sektor transportasi dan ketergantungan logistik perekonomian ASEAN terhadap konsumsi BBM yang harganya berfluktuasi sejak perang Rusia-Ukraina. Agenda ini meliputi bukan hanya pembangunan pabrik mobil listrik dan komponennya tetapi juga perdagangan komponen mobil listrik, pembangunan rantai pasok mobil listrik, pelatihan pekerja yang bertransisi dari sektor-sektor terdampak, dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti tempat pengisian daya baterai dalam ASEAN.

Ketiga, negara-negara ASEAN perlu **meningkatkan kembali produksi listrik** dengan fasilitas yang ada, **dan mempercepat pembangunan pembangkit listrik dengan energi terbarukan**. Meningkatnya kebutuhan energi ASEAN pada masa mendatang merupakan kesempatan baik untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), tenaga angin, tenaga air (PLTA), dan tenaga geotermal (PLTG), serta infrastruktur pendukungnya, seperti fasilitas penyimpanan dan transmisi energi terbarukan (*energy transmission and storage*). Ini juga kesempatan baik untuk ASEAN meningkatkan visibilitas proyek-proyek *microgrid* untuk daerah-daerah terpencil ke perhatian publik.

Jika masa transisi penutupan PLTU batu bara perlu diperpanjang karena kebutuhan energi jangka pendek, negara-negara ASEAN minimal dapat menghentikan

pembangunan PLTU batu bara baru yang dapat meningkatkan emisi, memperlambat transisi energi, dan mengakibatkan kerugian besar saat PLTU batu bara tersebut perlu ditutup. Pembangunan pembangkit listrik merupakan pembangunan infrastruktur yang strategis dan yang akan meninggalkan *legacy* panjang untuk kehidupan di ASEAN.

Keempat, *green and blended finance* merupakan bagian penting bagi transisi energi ASEAN dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebutuhan pembiayaan transisi energi harus dapat ditanggung oleh semua pihak terkait. ASEAN dapat keluar dengan skema *blended financing* yang memungkinkan partisipasi dari pemerintah, sektor keuangan global, serta *philanthropy*. Skema yang melibatkan tiga pihak ini akan memungkinkan pembiayaan proyek energi menjadi lebih *financially feasible*. Sektor keuangan global menjadi penyedia pembiayaan, pemerintah menjadi pemberi jaminan, dan *philanthropy* mengambil alih berbagai kegiatan yang kurang menguntungkan secara finansial, seperti penyediaan *feasibility studies* awal. Pembentukan platform *blended financing* untuk transisi energi ini juga sejalan dengan usulan yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo di *ASEAN Leaders Gathering* di Bali pada tahun 2018.

Terakhir, ASEAN juga dapat mendorong pembicaraan lebih jauh mengenai *green trade* dalam agenda perdagangan. Perdagangan bebas komponen dan teknologi hijau, serta *green products* antara negara-negara ASEAN dan sekitarnya dapat mendukung proses transisi energi dan sektor swasta, tetapi implementasi tarif berlebihan dapat membuat mahal proses dan biaya transisi energi tersebut. Perdagangan energi seperti dalam inisiatif *ASEAN Power Grid* (APG) juga merupakan pembahasan penting untuk mendukung ketahanan energi negara-negara ASEAN dan mendukung kerja sama dalam pembangunan pembangkit listrik-pembangkit listrik baru dan *power grid* multilateral seperti di pulau Kalimantan dan di Semenanjung Indochina. Koordinasi kebijakan *green trade* dan kebijakan insentif dengan sebuah kesepakatan ASEAN akan mendukung upaya transisi energi dengan memberi kepastian yang lebih lagi untuk para investor, produsen, dan pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi di sektor energi hijau dan mobil listrik.

Dalam berbagai agenda tersebut, ASEAN dapat mempertimbangkan peran serta lebih besar dari negara mitra dialog. Jepang, misalnya, sedang mengusung visi "*Asia zero-emissions community*" dan *Asia Energy Transition Initiative*, yang juga menyediakan sumber daya finansial untuk pengembangan teknologi dan transisi energi. Pengembangan rantai pasok kendaraan elektrik juga dapat mengundang kerja sama dengan Jepang, Korea, ataupun Tiongkok. Kerja sama tersebut dapat meningkatkan keberhasilan dari berbagai agenda transisi dan keamanan energi di ASEAN.

Isu Prioritas 3: Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif, Aman dan Berdaya Saing di ASEAN

Ekonomi digital ASEAN diproyeksikan akan tumbuh secara signifikan dan diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS pada tahun 2030. Pertumbuhan perdagangan elektronik di ASEAN, sebagai salah satu sektor yang tumbuh pesat saat pandemi, diperkirakan tumbuh menjadi sebesar 200 miliar dolar AS pada 2025. Beberapa faktor yang mendukung akselerasi ekonomi digital di ASEAN antara lain investasi infrastruktur digital, percepatan penetrasi internet dan juga semakin besarnya kelompok menengah yang produktif. Beberapa perjanjian di ASEAN seperti e-ASEAN, *Masterplan on ASEAN Connectivity 2025* dan *ASEAN Agreement on e-commerce* termasuk persiapan negosiasi *ASEAN Digital Economy Framework* dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital di atas.

Akselerasi transformasi dan partisipasi ekonomi digital yang inklusif sebagai salah satu *Priority Economic Deliverables (PED)* pada *ASEAN Chairmanship 2023* memiliki potensi yang besar untuk memaksimalkan keuntungan dari tren digitalisasi dan juga memberdayakan masyarakat di ASEAN. Adapun beberapa isu yang penting diangkat dalam PED antara lain:

Pertama, tata kelola data dan *cross-border data flow*. Menurut *Digital Services Trade Restrictiveness Index (OECD)* dan *Digital and Sustainable Regional Integration Index (UNESCAP)*, rezim perdagangan digital di beberapa negara di ASEAN masih cenderung tertutup dan kurang terintegrasi. Salah satu isu yang mengemuka adalah terkait dengan kesiapan kerangka regulasi dalam ekonomi digital khususnya perdagangan elektronik antarnegara.

Namun demikian, negara-negara di ASEAN masih terjebak dalam konsep perdagangan yang cenderung tradisional dan tertutup. Selain itu, dari sisi kerangka regulasi tata kelola data (*data governance*) masih ada beberapa negara yang belum memiliki regulasi perlindungan data pribadi. Tentunya potensi keuntungan dari integrasi ekonomi digital di ASEAN tidak akan maksimal apabila kerangka regulasi di atas sesuai dengan *best practices* yang bertujuan untuk melindungi konsumen serta mendorong inovasi sektor usaha.

Kedua, literasi dan keterampilan digital untuk kelompok rentan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Untuk mendorong ekonomi digital yang inklusif dan produktif, literasi dan keterampilan digital merupakan salah satu aspek yang paling penting karena aspek ini memiliki tantangan terbesar menurut *ASEAN Digital Integration Index* (2021). Oleh sebab itu, fokus agenda ASEAN untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital, khususnya kepada kelompok rentan seperti perempuan, usia

muda, dan disabilitas. Perlu juga diperhatikan peningkatan kemampuan digital untuk pemberdayaan ekonomi, baik untuk individual maupun usaha kecil dan menengah.

Oleh sebab itu, perlu adanya inisiatif *monitoring* dan evaluasi beberapa indikator-indikator relevan untuk melihat tingkat literasi dan kemampuan digital pada kelompok rentan dan UKM. Indonesia dapat mengajak negara ASEAN untuk juga dapat mengadopsi *G20 Toolkit on Digital Skills and Literacy* (CSIS 2021), yang merupakan salah satu *deliverables* yang Indonesia tawarkan di G20 2022. Penggunaan *toolkit* tersebut, setelah disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara, akan membantu melihat permasalahan yang dihadapi dan perumusan kebijakan yang diperlukan.

Ketiga, peningkatan mobilitas tenaga kerja di ASEAN, khususnya di sektor ekonomi digital. Mobilitas tenaga kerja memiliki dampak yang baik bagi perekonomian karena berhubungan positif dengan kolaborasi dan inovasi. Selain itu, mobilitas tenaga kerja juga meningkatkan kemungkinan terjadinya difusi teknologi, *exchange of knowledge* dan keahlian yang sangat penting khususnya dalam era ekonomi digital di ASEAN. Untuk menjadi *global hub* pada sektor ekonomi digital, ASEAN harus bisa menjadi kawasan berkumpulnya para inovator dan kolaborator.

Untuk itu, harmonisasi dan *streamlining* visa pekerja dapat menurunkan biaya mobilitas pekerja di ASEAN. Beberapa *mutual recognition agreements (MRAs)* sudah dimiliki ASEAN untuk beberapa pekerjaan namun implementasinya masih terhambat dengan regulasi domestik dan *licensing requirements*. Oleh sebab itu, inisiatif terobosan untuk memperlancar mobilitas pekerja di sektor ini akan sangat penting bagi kondisi tenaga kerja untuk merespons dinamika sektor ekonomi digital.



 csis.or.id

 csis@csis.or.id

  [@csisindonesia](https://www.instagram.com/csisindonesia)

  [CSIS Indonesia](https://www.linkedin.com/company/csis-indonesia)

**Centre for Strategic and
International Studies
(CSIS Indonesia)**

Jl Tanah Abang III No 23-27
Gambir, Jakarta Pusat 10160
Indonesia